

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur Provinsi Maluku Utara membutuhkan cara tersendiri dalam mendesain arah pengembangan wilayahnya. Keunikan dan kekayaan sumberdaya alam yang besar dengan fisik wilayah yang luas dan dipisahkan oleh pulau-pulau besar dan kecil, menyebabkan pentingnya pemekaran wilayah guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya melalui kegiatan pembangunan daerah. Kebutuhan ini searah dengan pergeseran paradigma pembangunan nasional, mengingat orientasi pembangunan wilayah sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah (OTDA) di Indonesia memiliki perbedaan. Dan otonomi daerah diberlakukan dengan sejumlah tujuan, diantaranya meningkatkan kinerja ekonomi daerah, penyebaran (*dispertion*) kegiatan pembangunan, mengintensifkan kegiatan pelayanan pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lokal, dan mencegah terjadinya kebocoran wilayah.

Sebelum dimekarkan wilayah Provinsi Maluku Utara terdiri dari dua kabupaten dan satu kota. Daerah-daerah tersebut, diantaranya Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate dengan Pulau Halmahera (dengan wilayah yang besar dan kaya akan sumberdaya alam) merupakan wilayah kecamatannya. Kinerja ekonomi Kabupaten Maluku Utara memiliki (PDRB atas dasar harga konstan) pada tahun 2000 hanya sebesar Rp. 458,7 milyar, sedangkan Kota Ternate pada tahun yang sama PDRB-nya sebesar Rp. 199,6 milyar (BPS, Kota Ternate Dalam Angka, 2001).

Perekonomian wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki struktur dan corak ekonomi yang terbuka (*open economy*). Terdapat pengaruh timbal-balik antara faktor-faktor eksternal dalam lalu lintas ekonomi nasional (bahkan internasional) dan kekuatan ataupun kelemahan yang terkandung di dalam wilayahnya sendiri. Secara internal, Provinsi Maluku Utara menghasilkan bahan mentah ataupun setengah terolah yang termasuk kategori primer. Dalam hubungan ini, suatu peningkatan ataupun kemunduran dalam perdagangan secara nasional maupun internasional mempengaruhi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara. Dampaknya, akan terasa sekali bagi pendapatan sebagian penduduk yang bermata pencaharian di sektor/subsektor pertanian ekspor.

Sebagaimana disebutkan di atas, dalam pelaksanaan pembangunannya, Provinsi Maluku Utara juga memiliki sejumlah kendala khas yang biasanya dihadapi oleh wilayah kepulauan. Secara geografis, Provinsi Maluku Utara memiliki fisik wilayah yang luas dengan sebaran kandungan sumber daya alam antar-wilayah yang beragam dan belum tergarap secara optimal. Penduduk dan ketidaktersediaan infrastruktur yang menyebar tidak merata menyebabkan akses antarwilayah menjadi terbatas. Pada gilirannya, terdapat perbedaan pembangunan antarwilayah; beberapa wilayah memiliki perkembangan yang pesat dibandingkan wilayah lainnya. Sebagai bekas ibukota sementara Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate memiliki struktur perekonomian yang dominan disumbang oleh sektor hotel, perdagangan dan jasa. Masyarakatnya menikmati pendapatan perkapita yang lebih tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran yang lebih rendah, kualitas sumber daya manusia yang baik menyebabkan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi serta akses terhadap infrastruktur yang lebih mudah dijangkau.

Pembangunan suatu daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur.

Selain itu juga infrastruktur juga roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses usaha dalam meningkatkan pemasukkan atau pendapatan perkapita suatu Negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi bentuk riil.

Pembangunan ekonomi juga penting yang wajib diupayakan oleh semua daerah demi kepentingan bersama. Karena langkah tersebut merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi dapat berhasil apabila dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan perekonomian daerah yang lebih kuat (Subandi, 2014).

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB di Maluku Utara selama kurun waktu 2013-2020 cenderung meningkat, yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di provinsi Maluku Utara ini walaupun masih jauh dari rata-rata nasional pada periode tersebut. Jika pada tahun 2010 rasio antara PDRB Maluku utara. Apabila pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, ini menunjukkan kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Maluku Utara. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam pengembangan infrastruktur harus secara terus menerus di lakukan dan harus di selaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah di capai dan yang ingin di wujudkan pada masa depan. Dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penting bagi penulis untuk merumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apakah infrastruktur jalan, Infrastruktur air bersih dan Infrastruktur listrik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, air dan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai informasi ilmu dan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonommi Provinsi Maluku Utara.
1. Sebagai bahan studi, perbandingan dan tambahan ilmu pengetahuan Khususnya mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dan dapat di jadikan sumber informasi bagi kalangan akademis dan peneliti dalam melakukan penelitian.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini di harapkan menjadi salah satu sumbagan pemikiran bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara, Sebagai masukan dalam peyusunan perencanaan pembagunan daerah demi kesejahteraan rakyat.